

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah suatu negara kesatuan yang memiliki berbagai daerah yang terdiri atas pulau, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Negara Indonesia merupakan negara yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya dengan sistem otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat (6) tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta mengoptimalkan kinerja dalam mengelola keuangan daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah juga menganut prinsip nyata dan bertanggung jawab. Makna nyata di sini adalah penanganan urusan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban secara nyata telah ada dan berpotensi tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Kemudian, yang dimaksud bertanggung jawab adalah

penyelenggaraan otonomi harus terus meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan salah satu tujuan nasional.

Salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah adalah mengelola keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 1 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah sehubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Definisi inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk bergerak di area keuangan daerah.

Keuangan daerah memainkan peran yang krusial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Perwujudan kesejahteraan masyarakat daerah akan lebih mudah dicapai apabila pemerintah daerah memiliki kondisi keuangan yang baik. Keuangan pemerintah daerah yang baik dapat dilihat dari berbagai indikator, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat kemandirian daerah dan sebagainya. Namun, keuangan daerah yang baik mustahil dicapai apabila pengelolaan keuangan daerah tidak memadai.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah ruang lingkup keuangan daerah pada tingkat pemerintah daerah yang terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan kunci penentu keberhasilan dan kesuksesan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 pasal 1 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah juga dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan optimal akan menjamin tercapainya pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang nantinya akan memberi dampak pada peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran dari pengelolaan keuangan organisasi yang dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban. Menurut Sari (2016) Kinerja keuangan adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah (Mahsun, 2013:25).

Kinerja keuangan merupakan indikator yang dapat dipakai untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. Pengukuran terhadap kinerja keuangan suatu pemerintah daerah dinilai perlu dilakukan untuk memberikan umpan balik sebagai upaya perbaikan secara terus menerus dan pencapaian tujuan di masa mendatang serta untuk menilai kinerja keuangan di masa lalu dengan melakukan berbagai

analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berkelanjutan. Menurut (Adhiantoko, 2013) pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Kinerja keuangan memiliki dasar penilaian kinerja keuangan yaitu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang wajib disampaikan oleh pemerintah daerah yang berperan sebagai penanggung jawab pengelolaan, pembenahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik. Mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal mengelola keuangan daerahnya dapat dilakukan dengan menerapkan rasio keuangan terhadap APBD. Rasio keuangan yang dapat digunakan yaitu rasio ketergantungan keuangan daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan baik dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika pemerintah daerah mampu mengelola keuangannya dengan baik serta mampu membiayai semua kegiatan pembangunan dengan pendapatan daerahnya sendiri, maka dapat dikatakan tingkat kemandirian daerahnya baik dan meningkat. Tingkat kemandirian yang meningkat merupakan salah satu kriteria yang dapat menunjukkan bahwa kinerja keuangan dalam suatu daerah itu membaik. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah semestinya dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangannya agar kinerja keuangan dapat dinilai baik. Namun meskipun demikian, nyatanya tidak sedikit

pemerintah daerah yang masih harus membenahi pengelolaan keuangannya baik dari segi penerimaan maupun pengeluaran.

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap, Warsono bahkan menyebut kondisi ini tidak baik-baik saja. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan PAD Kabupaten Cilacap sangat kecil, yakni 3,98%. Dari periode kinerja pendapatan 2019-2022 ternyata kondisinya tidak baik-baik saja karena PAD kita pertumbuhannya masih relatif kecil, sehingga menurunkan kinerja keuangan pemerintah juga, kata Warsono dalam Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2024 di Aula Diklat Praja, Jalan Jenderal Sudirman Cilacap, Rabu (4/1/2023). (cilacapkab.go.id)

Kepala BPS Kabupaten Bogor, Gandari Aju Fatimah memaparkan bahwa pandemi COVID-19 telah meluluhlantahkan seluruh sektor di seluruh dunia, termasuk Kabupaten Bogor. Namun geliat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bogor menunjukkan peningkatan yang signifikan pasca pandemi COVID-19 melanda. Dilihat dari indikator makro pembangunan Kabupaten Bogor sejak pandemi COVID-19, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, mulai tahun 2021 kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor cukup mencengangkan dari minus 1,77 persen melesat naik jadi 3,55 persen dan bahkan semakin meningkat pesat pada tahun 2022 menjadi 5,20 persen. Meskipun demikian, selama masa pandemi COVID-19 pertumbuhan dan kinerja keuangan mengalami penurunan yang sangat drastis bahkan menyentuh angka minus. (jabarprov.go.id)

Penerimaan negara membahas tentang beberapa sumber-sumber negara memperoleh pendapatan. Penerimaan negara tidak dapat digunakan secara langsung untuk pengeluaran. Menurut Adetya (2014) penerimaan negara merupakan pemasukan yang diperoleh negara untuk membiayai dan menjalankan setiap program-program pemerintahan, sedangkan sumber-sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu Tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Menurut aries Djaenuri (2016) pengeluaran pemerintah adalah uang atau dana yang keluar dari kas pemerintah atau kas neegara untuk membiayai aktivitas pemerintah atau tujuan lain yang menjadi kewenangan pemerintah

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa realisasi pendapatan negara pada APBN tahun 2021 tercatat mencapai Rp2.001,3 triliun, sementara realisasi belanja negara pada APBN tahun 2021 mencapai Rp2.784,4 triliun. Realisasi penerimaan tertinggi diperoleh dari penerimaan perpajakan pada tahun 2021 yang telah kembali dan melewati level pra-pandemi tahun 2019. Capaian penerimaan tersebut perlu dipertahankan, karena kedepannya tidak ada yang tahu seperti apa. Sedangkan realisasi belanja negara diberikan

pemerintah untuk kenaikan peningkatan belanja subsidi dan realisasi belanja modal dari pengadaan proyek-proyek strategis nasional oleh LMAN. Realisasi tersebut digunakan untuk mengembalikan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menjadi lebih baik bahkan melewati masa sebelum pandemi, sehingga pengeluaran negara dari APBN mengalami peningkatan. Dibalik itu sebmua masih terdapat defisit yang menyebabkan pemerintah harus ikut mendanai dengan pembiayaan yang ada. Meskipun penerimaan dan pengeluaran meningkat, tetap saja terjadi defisit pada anggaran, karena pengeluaran yang digunakan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima. (Kemenkeu, 2022)

Plt. Kakanwil DJPN Prov. Jabar Ade Rohman mengemukakan bahwa realisasi APBD di tahun 2021 realisasi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diperkirakan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 20,19 persen. Sementara total penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 1,07 persen. Sedangkan dari segi struktur realisasi pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2020 Pendapatan Asli daerah (PAD) sebesar 16,97% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 27,15%. Meskipun demikian masih terdapat beberapa hal yang menyebabkan belum optimalnya penerimaan PAD tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah masih adanya sumber pendapatan potensial yang dapat digali oleh Pemerintah Kabupaten/Kota namun berada diluar wewenang Pemerintah Daerah tersebut, BUMD pada umumnya belum beroperasi secara efisien, masih rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat, dan kurang mampunya Pemerintah Daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan

alternatif. Dengan kata lain, peranan PAD di Pemda Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang relatif kecil mencerminkan tingkat ketergantungan keuangan Pemda Kabupaten/Kota terhadap pemerintah pusat. (Alamsyah, 2022)

Dalam hal ini, masih banyak pula daerah-daerah yang masih bermasalah seperti menurunnya pendapatan pada setiap daerah. Jika APBD mengalami masalah seperti menurunnya realisasi penerimaan khususnya dalam pendapatan asli daerahnya, maka akan menyebabkan tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Hal ini terjadi terjadi karena pendapatan daerah yang menurun akan mengakibatkan kebutuhan pembiayaan pengeluaran Kabupaten dan Kota sebagian besar akan didanai oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Tentunya hal tersebut akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah yang akan dinilai buruk karena tingkat kemandirian daerah dalam mendanai kebutuhannya rendah. berikut ini merupakan kondisi realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

Realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah dari 27 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 yang mengalami masalah yaitu sebesar 30% dan yang tidak bermasalah sebesar 70%. Berikut ini Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat yang bermasalah dengan realisasi penerimaan pada tahun 2021 diantaranya Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur,

Kota Bandung, Kota Bekasi, kota Banjar, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya. Permasalahan terjadi karena banyaknya penerimaan daerah yang mengalami penurunan, seperti pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi daerah dan pajak daerah. Pajak daerah yang tidak mencapai target diantaranya pajak parkir, pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan. (Badan Pusat Statistik Jawa Barat 2021)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (pemda) tidak hanya bergantung pada bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Menurut dia, pemda harus berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Tito mendorong kepala daerah menggali potensi daerah masing-masing. Potensi itu misalnya, sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), dan pariwisata agar PAD bisa meningkat. Menurut Tito, upaya pemda ini penting, sebab jika merujuk pada data di daerah, rata-rata PAD provinsi hanya menyumbang sebesar 46 persen total APBD. Sementara itu, untuk kabupaten/kota itu rata-rata PAD hanya menyumbang 20% total APBD. Sisanya, yakni 80 persen tergantung transfer pusat. (Dian, 2022)

Fraksi Partai Hanura DPRD yang terdiri dari Gustirandra, Epi Suardi, dan Arsimesdes menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) hanya berkontribusi terhadap total pendapatan daerah di bawah 10 persen atau pasnya 8,78 persen dari total pendapatan daerah. Jika dilihat melihat realisasi PAD pada lima tahun sebelumnya, realisasi PAD tidak pernah memenuhi target dari rancangan APBD. Bahkan bisa dikatakan, PAD hanya berkontribusi terhadap total pendapatan daerah

di bawah 7 persen. Selain itu, pendapatan daerah masih cenderung bergantung kepada bantuan pemerintah pusat dengan persentasi kontribusi sebesar 86,57 persen. (padek.jawapos.com)

Kepala Bapenda Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2021 di Jawa Barat mencapai Rp37 triliun atau melampaui target sebesar Rp36,09 triliun. Jumlah realisasi tersebut diperoleh paling banyak dari pajak kendaraan bermotor dengan bea balik nama kendaraan bermotor. Meskipun demikian, Bapenda harus memiliki strategi kedepannya untuk meningkatkan pendapatan di tahun 2022 dengan suasana masih pandemi. Bapenda Jawa Barat juga sudah mulai berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mulai merealisasikan target peningkatan optimalisasi peraihan pajak. (jabar.antarnews.com)

Menurut Iwan Hermawan dalam artikel PAD Kota Bandung Tak Capai Target, Pemkot Harus Berbenah (Senin, 4 April 2022). Mengatakan bahwa capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sorotan, berdasarkan data dari BPKA pendapatan pajak daerah Kota Bandung tahun anggaran 2021 realisasinya 84,20 persen, komponen pajak yang tidak memenuhi target diantaranya pajak hiburan, reklame, bumi dan bangunan, dan BPHTB. Hal itu harus di evaluasi dari sisi-sisi pendapatan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menghasilkan pendapatan, evaluasi dan kondisinya tidak mencapai target PAD yang diharapkan. (bandung.pks.id)

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat memiliki strategi dalam menghimpun pendapatan di tahun 2023, salah satunya dengan mengoptimalkan

penerimaan dari pemanfaatan asset dan barang milik daerah. Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik menyebut, optimalisasi penerimaan dari pemanfaatan asset dan barang milik daerah diperlukan karena realisasinya belum mencapai 100 persen di tahun 2022. Misalnya, pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan atau dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki realisasi 99 persen. Selain itu, kontribusi PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) itu 40 persen dari total pendapatan pajak daerah, maka dari itu harus dilakukan penguatan pada sektor ini, salah satunya dengan meningkatkan layanan daring. (pajak.com)

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menaikkan target penerimaan pajak agar dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik dibandingkan tahun lalu. Ia mengatakan bergeliatnya sektor pariwisata dan kuliner di wilayah Kabupaten Purwakarta, setiap perangkat daerah harus mengecek sumber-sumber pendapatan di wilayah kerjanya masing-masing. Dan hal ini juga hendaknya dijadikan momentum untuk meningkatkan PAD dari sektor retribusi daerah. Untuk mencapai target PAD, ia mendorong jajarannya untuk terus berupaya mengedukasi masyarakat mengenai manfaat membayar pajak. (pajak.com)

Selain masalah realisasi pada penerimaan pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat masih banyak mengalami kendala. Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan yang menyampaikan pandangan umum atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 dalam Rapat paripurna DPRD Jawa Barat. Menurutnya rendahnya realisasi belanja modal maupun transfer ke kabupaten/kota membuat pembangunan di

daerah khususnya pembangunan infrastruktur publik yang penting menjadi terganggu seperti jalan dan jembatan. (Taufik, 2022)

Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional, Emmy Setiawan mengatakan belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah. Karena itu pemda diminta rasionalisasi anggaran agar tidak terjadi defisit. Selain itu, belanja modal ini sangat minim dan berharap bisa ditambah karena fakta di lapangan kebutuhan meningkat pasca pandemi Covid-19. Maka dari itu, belanja modal harus dinaikkan dan mengurangi belanja barang dan jasa. (padek.jawapos.com)

Deni Asri menilai bahwa sudah seharusnya pemda mengambil langkah strategis untuk mengelola potensi PAD dan melakukan belanja yang efektif dan efisien. Pemkab harus bekerja lebih maksimal dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam 5 tahun kedepan, untuk meningkatkan PAD dan tidak tergantung kepada pendapatan transfer dari pusat. (padek.jawapos.com)

Rendahnya realisasi APBD tentunya dapat menghambat pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah. Selain itu, rendahnya realisasi APBD akan berdampak juga pada pelayanan masyarakat sehingga kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah akan berkurang. Hal ini tentunya akan memberikan efek yang buruk terhadap kinerja keuangan pemerintah, karena pada dasarnya belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang mafaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah daerah sudah semestinya untuk memaksimalkan anggaran belanja dan meningkatkan kinerja untuk memberikan pelayanan lebih baik bagi masyarakat. Tersedianya infrastruktur yang baik akan

meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Masyarakat sejahtera akan menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerahnya baik.

Terkait pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sudah banyak dilakukan penelitian, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Gina Sukma Antasari (2018) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitian tersebut bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ni Made Diah Permata Sari dan I Ketut Mustanda (2019) dengan judul Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja keuangan Daerah. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten Badung. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung. Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Badung.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nada Dipa Prastiwi dan Andri Waskita Aji (2020) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018). Hasil penelitian tersebut menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018. Dana Keistimewaan berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018. Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Joice Machmud dan Lukfiah Irwan Radjak (2018) dengan judul Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian tersebut menyatakan Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Kabupaten Gorontalo. Dana Alokasi Umum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Kabupaten Gorontalo.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ni Kadek Novia Indrawati Putri (2019) dengan judul Pengaruh PAD dan Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah

Sarbagita Provinsi Bali tahun 2012-2016 yang bermakna bahwa kekayaan daerah berupa PAD oleh pemerintah daerah tidak serta merta dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di wilayah Sarbagita Provinsi Bali tahun 2012-2016 yang mengindikasikan besar dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat maka dapat mencerminkan ketergantungan daerah tersebut terhadap pemerintah pusat.

Sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Afia Maulina, Mustafa Alkamal, dan Nabilla Salsa Fahira (2021) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Belanja Modal menunjukkan hubungan yang positif, namun tidak menunjukkan hasil yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Ukuran Pemerintah Daerah menunjukkan hubungan yang positif, namun tidak menunjukkan hasil yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Penelitian ini memfokuskan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ni Putu Gina Sukma Antasari (2018), penelitian ini memfokuskan pada variabel pendapatan asli daerah dan belanja modal. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu:

1. Lokasi penelitian pada penelitian sebelumnya dilakukan di wilayah Sarbagita Provinsi Bali, sedangkan penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Barat.
2. Pemilihan tahun pengamatan penelitian dan unit observasi yang diteliti. Penelitian sebelumnya menggunakan data tahun 2011-2015, sedangkan penelitian ini menggunakan data tahun 2017-2021.
3. Populasi pada penelitian sebelumnya mengambil sebanyak 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, sedangkan populasi penelitian ini sebanyak 18 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Barat. Alasan penelitian di Provinsi Jawa Barat karena berdasarkan fenomena-fenomena yang dipaparkan diatas bahwa pendapatan asli daerah dan belanja daerah belum optimal karena kurangnya pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan penerimaan.
4. Metode analisis data pada penelitian sebelumnya menggunakan analisis rasio pertumbuhan, sedangkan metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis rasio ketergantungan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Akuntansi Pemerintah dan menuangkannya ke dalam laporan skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017-2021)”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan beberapa identifikasi masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Menurunnya kinerja keuangan pemerintah daerah disebabkan oleh kondisi kondisi pandemi COVID-19
2. Menurunnya pendapatan daerah dari sektor retribusi dan pajak daerah. Pajak daerah yang tidak mencapai target diantaranya pajak parkir, pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan.
3. Minimnya realisasi belanja modal di sejumlah wilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa barat yang disebabkan karena belum maksimalnya kinerja pemerintah daerah dalam memaksimalkan anggaran belanja daerah.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunan penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2017-2021.
2. Bagaimana Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2017-2021.
3. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2017-2021.
4. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2017-2021.
5. Seberapa besar pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2017-2021.
6. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Belanja Modal secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2017-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memperluas ilmu pengetahuan yang dapat membantu dalam pengembangan ilmu ekonomi akuntansi khususnya yang berkaitan dengan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang terkait diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan pengetahuan baru mengenai Pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. selain itu memberikan wawasan yang lebih luas terhadap pengelolaan keuangan agar Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menjadi lebih baik.

2. Bagi Instansi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap pemerintah untuk memberikan pelayanan serta meningkatkan kinerja pemerintah yang lebih baik.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan dan pemikiran yang dapat membantu berkontribusi untuk pengembangan dalam penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Jawa Barat yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota yang mana peneliti melakukannya dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi internet karena datanya berupa data sekunder. Penulis mengambil data yang diunduh dari *jabar.bps.go.id* dan situs lain yang dapat mendukung penelitian. Waktu yang dibutuhkan peneliti dimulai dari bulan februari sampai dengan selesai.